

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu wilayah di Sumatera Barat yaitu Kota Padang merupakan kawasan/daerah rawan bencana yang disebabkan karena letaknya terletak dekat dengan zona subduksi, yaitu pertemuan 2 lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia bagian tenggara. Selain itu Kota Padang berada pada garis patahan sumatera yang dikenal dengan patahan semangko dan sebagian besar wilayahnya berada di pesisir pantai sehingga sangat rentan terhadap ancaman bencana khususnya bencana gempa bumi dan tsunami.

Dilihat dari sejarah, gempa bumi termasuk bencana yang tergolong besar terjadi di wilayah Sumatera Barat adalah gempa yang terjadi pada 30 September 2009 dengan kekuatan gempa 7,9 Skala Richter di Padang dan gempa di Mentawai pada 25 Oktober 2010 dengan kekuatan gempa 7,2 pada skala richter. Akibat dari bencana ini banyak terjadi kerusakan bangunan dan banyak menelan korban jiwa.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011, Kota Padang termasuk wilayah/kota yang memiliki potensi rawan bencana tinggi dengan potensi dampak bencana tsunami di 8 Kecamatan, 33 Desa/Kelurahan dan 556.559 jiwa penduduk seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Kabupaten/Kota yang terdampak tsunami

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA//KEL/ NAGARI	PERKIRAAN YG TERDAMPAK
1	Pesisir Selatan	11	61	176.370
2	Kep. Mentawai	10	35	44.040
3	Pasaman Barat	5	5	31.848
4	Agam	1	3	19.368
5	Padang Pariaman	6	11	63.536
6	Padang	8	33	556.559
7	Pariaman	4	11	58.551
	JUMLAH	45	219	950.271

Sumber : BNPB, 2011

Dengan tingginya potensi rawan bencana di Kota Padang maka diperlukan upaya pengurangan risiko bencana oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Upaya penanggulangan bencana merupakan bagian dari program pembangunan nasional, dan telah menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah Kota Padang. Hal ini sejalan dengan misi penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Daerah Kota Padang selaku pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas dalam rangka mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami, sehingga diperlukan upaya untuk mempersiapkan langkah-langkah yang cepat dan efektif dalam menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan uraian diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam hal pengurangan risiko bencana khususnya bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kapasitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami.

Penelitian tentang kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang didalam pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a) Memberikan gambaran kapasitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami.
- b) Adanya langkah-langkah yang cepat dan efisien dalam pengurangan risiko bencana dan penerapan sistem mitigasi yang berkelanjutan.
- c) Bahan masukan untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 5 tahunan Pemerintah Daerah Kota Padang.

1.3 Batasan Masalah

Penentuan batasan masalah perlu dilakukan agar dapat memberikan acuan yang tepat pada penelitian ini. Pada penelitian ini diambil studi kasus di Kota Padang. Permasalahan dalam pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab berbagai pihak, tidak terbatas pada pemerintah kota saja. Agar pengurangan risiko bencana dapat berjalan dengan baik diperlukan regulasi untuk menetapkan dan menjadikan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai kegiatan prioritas dan berkesinambungan pada tingkat Kota. Adanya pemikiran yang sama tentang program pengurangan risiko bencana pada Pemerintah Kota bersama dengan masyarakat dan dunia usaha, serta adanya anggaran yang memadai untuk dapat mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana tersebut.

Sehubungan hal tersebut, pada penelitian ini akan diidentifikasi kapasitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Padang terhadap pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami. Identifikasi kapasitas terhadap pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami pada Pemerintah Daerah Kota Padang meliputi kapasitas regulasi, kapasitas komitmen organisasi, kapasitas aparatur, kapasitas pembiayaan, dan kapasitas daya dukung organisasi. Dimana identifikasi kapasitas instansi tersebut disarikan dari variabel pengukuran kapasitas oleh Patton & Sawicki (1986), Soeprpto (2005), UNDP (2009), World Bank (2010) dan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).